

CIRI-CIRI PEMBANGUNAN POLITIK (DALAM STUDI KASUS PARTISIPASI POLITIK DI INDONESIA)

Oleh

ADITYAWARMAN

Staff Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Galuh Ciamis

Abstrak

Para sarjana barat mengembangkan kajian Pembangunan Politik dalam memahami perubahan sosial politik di Negara-negara yang sedang berkembang. Oleh karena itu, konteks pembangunan politik cenderung ditujukan pada Negara-negara sedang berkembang dengan asumsi bahwa dinegara-negara tersebut belum berjalan apa yang disebut dengan rasionalisasi, integrasi dan demokratisasi. Hal ini menimbulkan instabilitas politik yang pada akhirnya mempengaruhi kapasitas sistem politik dari Negara-negara tersebut. Itulah sebabnya perlu dilaksanakan pembangunan politik, agar kapasitas sistem politik dapat terpelihara dan berkembang. Studi pembangunan politik mengalami perkembangan yang sangat pesat sejak tahun 1950-an. Perkembangan ini telah menghasilkan sejumlah literatur dan kemajuan ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan. Perkembangan ini membawa dampak bagi negara-negara berkembang dan negara-negara yang baru merdeka untuk diteliti oleh ilmuwan politik di Amerika Serikat. Tulisan ini akan membahas tentang bagaimana ilmuwan Barat/Amerika Serikat melihat partisipasi politik. Setelah itu akan dilihat kesulitan-kesulitan yang timbul bila teori partisipasi politik seperti yang digunakan di Barat digunakan untuk menjelaskan masyarakat di negara-negara dunia Ketiga, dalam hal ini Indonesia.

Kata Kunci : Pembangunan Politik dan Partisipasi Politik

PENDAHULUAN

Sumbangan terpenting yang dihasilkan studi pembangunan politik adalah teori politik. Penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan Barat di berbagai dunia ketiga yang menghasilkan banyak teori baru yang sebelumnya tidak dikenal. Mereka mempelajari perkembangan dan ciri-ciri masyarakat di negara-negara berkembang yang berbeda dengan masyarakat Barat. Ilmuwan politik Amerika menguji teori-teori politik yang telah dihasilkan sebelumnya berdasarkan studi terhadap masyarakat mereka sendiri.

Pembangunan politik menjadi sebuah disiplin yang paling populer dalam ilmu politik. Sub disiplin ini berkembang makin pesat karena besarnya minat pemerintah Amerika Serikat dan para ilmuwan politiknya untuk mengadakan penelitian di negara-negara Asia, Afrika dan Amerika Latin. Pemerintah Amerika didorong oleh tujuan politik yaitu perlunya informasi yang akurat, sedangkan para ilmuwan politik didorong oleh oleh keingintahuan mereka sebagai ilmuwan. Interaksi faktor-faktor pendorong inilah yang telah melahirkan penelitian di bidang Ilmu Politik dan Ilmu Sosial yang dilakukan di berbagai negara berkembang.

Perkembangan studi pembangunan politik tidak dapat dipisahkan dari subdisiplin Perbandingan Sistem Politik karena pembangunan politik dan perbandingan sistem politik sering dianggap sebagai satu kesatuan. Perbandingan sistem politik menghasilkan studi Pembangunan Politik sebaliknya Pembangunan politik adalah arena studi perbandingan sistem politik dilakukan. Studi Pembangunan Politik dianggap sebagai studi perbandingan sistem politik yang memperbandingkan negara-negara yang sedang berkembang. Oleh karena itu, kajian yang memperbandingkan negara-negara Barat tidak dapat dimasukkan sebagai studi pembangunan politik.

Salah satu teori politik yang berkembang pesat dalam studi pembangunan politik adalah partisipasi politik. Kajian partisipasi politik telah dilakukan sejak tahun 1950-an, namun perkembangan yang pesat baru terjadi pada dasawarsa 1960-an. Teori-teori yang dihasilkan oleh penelitian terhadap masyarakat Barat dipertanyakan keabsahannya bila digunakan bagi masyarakat non Barat, ada bagian-bagian dari teori partisipasi politik yang relevan dengan masyarakat di negara-negara berkembang sedangkan sebagian lagi tidak relevan sehingga perlu untuk disesuaikan dengan karakteristik masyarakat tersebut. Hal

ini dapat dimengerti karena teori-teori partisipasi politik dibuat oleh ilmuwan Barat berdasarkan studi mereka terhadap masyarakatnya yang mempunyai nilai-nilai budaya dan perkembangan yang berbeda dari masyarakat di negara-negara berkembang.

PEMBAHASAN

Perkembangan Teori Partisipasi Politik

Istilah partisipasi politik adalah fenomena yang relatif baru dimana studi tentang tingkah laku pemilih memang telah dilakukan semenjak sebelum perang dunia ke Dua, namun para ilmuwan politik masih belum menggunakan istilah partisipasi politik untuk menyebutkan kegiatan politik tersebut. Salah satu tulisan pertama yang membahas tentang partisipasi politik secara mendalam adalah Robert Lane.

Perkembangan studi partisipasi politik mempunyai kaitan yang erat dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam ilmu politik. Setelah perang dunia ke Dua, para ilmuwan politik beranggapan bahwa pendekatan tradisional (kelembagaan/institusional) tidak lagi memadai untuk menjelaskan kehidupan politik. Oleh karena itu perlu diperlukan pendekatan baru yang lebih cermat dan mampu menjelaskan kehidupan politik secara lebih akurat dan sistematis. Untuk keperluan itu, para ilmuwan politik mengembangkan pendekatan baru yang disebut dengan pendekatan tingkah laku atau Behavioralist. Studi partisipasi politik mengalami perkembangan pesat di bawah pendekatan tingkah laku.

Pergeseran dari pendekatan kelembagaan ke pendekatan tingkah laku menghasilkan pergeseran dalam fokus perhatian dari ilmu politik dari masalah kelembagaan politik formal ke masalah yang berkaitan antara struktur politik dengan masyarakat. Studi ilmu politik yang menggunakan pendekatan tradisional lebih banyak memperhatikan lembaga-lembaga pemerintah dan organisasi-organisasi politik. Studi ilmu politik yang menggunakan pendekatan tingkah laku lebih banyak mengkaji interaksi antara anggota-anggota masyarakat (baik kelompok maupun Individu) dengan penguasa politik. Hal ini disebabkan ilmuwan politik menjadi lebih tertarik pada suara-suara yang berkembang dalam masyarakat dan dampaknya bagi para pengambil keputusan.

Perkembangan di atas telah terjadi demokratisasi dalam studi ilmu politik pada era

pendekatan tingkah laku, dalam arti bahwa suara rakyat mendapat tempat yang penting dalam kajian-kajian ilmu politik. Hal ini sesuai dengan paham liberal yang menjadi dasar masyarakat Barat sehingga pendekatan tingkah laku juga disebut sebagai pendekatan pluralist dalam ilmu politik.

Kaum behavioralist beranggapan bahwa pusat kehidupan politik adalah proses pengambilan keputusan yang menghasilkan keputusan politik, yaitu keputusan yang mengikat semua orang. Pelanggaran terhadap keputusan tersebut dapat ditindak dengan menggunakan kekerasan fisik secara sah. Berdasarkan hal ini, setiap kegiatan disebut kegiatan politik apabila kegiatan tersebut bertujuan mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang akan menghasilkan yang bercirikan :

1. Mengikat semua orang.
2. Pemaksaannya didukung oleh penggunaan kekerasan fisik secara sah, keputusan ini adalah keputusan politik.

Analisis struktural fungsional yang dirumuskan oleh Gabriel Almond dan G.Bingham Powell secara jelas menunjukkan alur kehidupan politik adalah dijalankannya fungsi-fungsi dalam sistem politik antara lain Input functions yang sebagian besar adalah kegiatan yang disebut sebagai partisipasi politik. Dengan begitu input function dapat dijalankan yaitu dengan dikeluarkannya keputusan politik, antara lain input functions yaitu partisipasi politik. Dan out put functions yaitu keputusan politik.

Pandangan yang mirip juga dikemukakan oleh David Easton dalam analisis sistem politiknya. Easton berpendapat bahwa input dalam bentuk tuntutan dan dukungan serta out put (keputusan) adalah titik perhatian kajian ilmu politik. Dari tulisannya dapat disimpulkan bahwa kegiatan menyampaikan dukungan dan tuntutan adalah partisipasi politik.

Dari kerangka analisis yang dirumuskan oleh kedua pelopor gerakan behavioralist ini dapat dilihat bahwa aspek masyarakat mulai terlihat memainkan peranan yang penting dalam analisis ilmu politik. Pemberian masukan adalah mutlak perlu bagi berfungsinya sebuah sistem politik. Berfungsinya sebuah sistem politik ditandai dengan dihasilkannya keputusan pemberian masukan dalam proses pengambilan keputusan adalah partisipasi politik.

Ciri-Ciri Pembangunan Politik
(dalam Studi Kasus Partisipasi Politik di Indonesia)
ADITIYAWARMAN

Dengan menggunakan teori Almond dan Easton dapat dimengerti berbagai alasan perlunya partisipasi politik yang dijalankan oleh warga negara, partai politik menurut mereka adalah kewajiban setiap warga negara karena keputusan yang dihasilkan oleh penguasa politik harus dipatuhi oleh setiap orang. Untuk mencegah dirugikannya seseorang dalam sebuah keputusan politik yang mengikat dan memaksa itu, orang tersebut haruslah menyampaikan kepentingan dan aspirasinya sehingga dapat diperhatikan oleh pembuat keputusan. Meskipun begitu, tidak ada jaminan bahwa setiap kepentingan atau aspirasi yang disampaikan dalam kegiatan partisipasi politik itu akan dipenuhi dan diperhatikan oleh keputusan yang dikeluarkan.

Alasan lain bagi perkembangan studi partisipasi politik yang pesat adalah kepedulian para ilmuwan politik Barat terhadap pelaksanaan ide-ide demokrasi, tidak saja di negara mereka sendiri tetapi juga dinegara-negara lain. Ide mendasar adalah bahwa demokrasi seyogyanya menjadi paham bagi semua orang termasuk mereka yang ada di dunia ketiga atau negara berkembang.

Oleh karena itu para ilmuwan Barat berpendapat bahwa partisipasi politik adalah sesuatu yang ideal bagi negara-negara dunia ke Tiga. Penguasa politik, menurut pandangan mereka tidak selayaknya menekan partisipasi politik di dalam masyarakat. Sebaliknya penguasa seharusnya memberikan kebebasan bagi rakyat untuk melakukan kegiatan-kegiatan politik.

Ciri-ciri Teori Partisipasi Politik

Ciri Pertama adalah teori partisipasi politik dirumuskan sesuai dengan nilai-nilai Barat yang dianut para ilmuwan tersebut, oleh karena itu masalah teori-teori politik Barat adalah kecenderungan nilai-nilai Barat dianggap berperan besar dalam perumusan teori-teori politik, termasuk partisipasi politik. Kelemahan terpenting dari teori yang seperti di atas adalah keterbatasan dalam penerapan dan kegunaan. Karena sangat diwarnai oleh nilai-nilai Barat dan sejarah perkembangan masyarakat di seluruh dunia. Teori partisipasi politik hanyalah relevan dengan masyarakat Barat dan hanya dapat digunakan untuk masyarakat tertentu.

Memang ada pandangan yang beranggapan bahwa masyarakat yang ada di dunia ini

mempunyai beberapa ciri yang sama. Namun ternyata bahwa perbedaan-perbedaan yang jelas dalam sejarah perkembangan masyarakat dan nilai-nilai budaya yang dianut masing-masing memainkan peranan yang cukup penting dalam menjadikan sebuah teori yang empirik di Barat bagi masyarakat non Barat.

Kenyataan ini mengharuskan diadakan pengujian teori partisipasi politik Barat secara berkesinambungan dengan menggunakan masyarakat Asia atau Afrika sebagai sasaran penelitian. Teori-teori Barat belum tentu dan tidak perlu terbukti empiriknya seluruhnya. Penemuan-penemuan dalam penelitian ilmiah terhadap masyarakat non Barat yang berbeda dari atau bertentangan dengan nilai-nilai budaya Barat adalah suatu kejadian yang biasa dalam pengujian teori ilmiah.

Ciri ke Dua dari teori partisipasi politik adalah bahwa teori partisipasi politik tersebut hanya mengkaji kegiatan politik yang dilakukan oleh masyarakat. Seperti aliran behavioralist melihat interaksi masyarakat di satu pihak dan penguasa politik dilain pihak sebagai obyek utama dalam kajian ilmu politik. Bagi mereka masyarakat memainkan peranan yang sangat penting dalam menentukan proses pembuatan keputusan politik karena keputusan tersebut adalah untuk kepentingan mereka, dan pembuat keputusan adalah mandataris masyarakat, sebenarnya pandangan ini adalah prinsip dasar dalam paham demokrasi.

Kaum behavioralist menganggap bahwa kegiatan-kegiatan politik yang dijalankan oleh warga masyarakat (partisipasi politik) memainkan peranan penting dalam sistem politik. Mereka menjadikan partisipasi politik dan tingginya tingkat perhatian penguasa politik terhadap Partisipasi input sebagai tolak ukur normatif bagi suatu sistem politik. Semakin berpengaruh partisipasi politik dalam proses pengambilan keputusan, semakin ideal sistem politik bersangkutan semakin demokratis.

Fokus perhatian partisipasi politik pada kegiatan politik rakyat biasa dipengaruhi oleh penghormatan yang tinggi terhadap paham demokrasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan : Apakah peranan yang dimainkan oleh para pengambil keputusan tidak perlu dianggap sebagai salah satu bentuk partisipasi politik ? semua para ilmuwan politik menjawab "tidak" bagi pertanyaan ini.

Pertanyaan lain yang muncul adalah apakah peranan para pembuat keputusan penting dalam ilmu politik? jawabannya adalah "ya" konsep sistem dalam ilmu politik yaitu sistem politik telah menunjukkan bukti-bukti bagi hal tersebut. Ini berlaku bagi kaum behavioralist. Ilmuwan politik institusional juga menganggap penting kajian tentang kelembagaan dan peranan para pembuat keputusan politik.

Meskipun dianggap penting, tetapi mengapa teori politik tidak menanamkan kegiatan politik para penguasa politik sebagai partisipasi politik? alasannya adalah karena para penguasa politik sudah dengan sendirinya menjalankan kegiatan-kegiatan politik. Mereka adalah elite politik yang memenuhi semua persyaratan untuk aktif dalam politik. Justru karena telah semenjak lama terbuka terhadap informasi politik dan terlibat langsung di dalamnya, para ilmuwan Barat tidak tertarik untuk memberikan nama "partisipasi politik" bagi kegiatan-kegiatan politik yang dijalankan oleh penguasa politik dalam tugasnya sebagai pembuat keputusan politik.

Terpusatnya perhatian para ilmuwan politik pada kegiatan politik yang dijalankan oleh anggota masyarakat sebagai warga negara biasa (Private Citizen, menurut Huntington dan Nelson) berarti bahwa partisipasi politik adalah salah satu bentuk dari kegiatan politik. Kegiatan politik yang dilakukan oleh warga negara dalam kedudukannya sebagai warga negara biasa disebut sebagai partisipasi politik. Kegiatan politik yang dijalankan oleh para penguasa politik sebagai warga negara dan anggota masyarakat dalam kedudukan mereka sebagai pembuat keputusan politik tidak dapat dinamakan partisipasi politik. Jadi, partisipasi politik mengandung adanya sasaran yang ingin di capai dituju yaitu proses pembuatan keputusan politik. Partisipasi bertujuan untuk mempengaruhi keputusan politik yang akan diambil agar keputusan itu menguntungkannya atau tidak merugikannya.

Kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh para penguasa politik dalam kedudukannya sebagai pembuat dan pembuat keputusan politik jelas merupakan kegiatan politik. Para Decision Makers yang menghasilkan keputusan politik menjalankan kegiatan politik dalam bentuk turut serta memberikan masukan untuk akhirnya menentukan masukan mana yang akan

dijadikan keputusan politik. Kelebihan para pembuat keputusan adalah bahwa masukan yang mereka berikan yaitu kepentingan, aspirasi dan pendapat mereka lebih mudah dibandingkan oleh orang lain.

Ciri ketiga adalah pentingnya persyaratan perkembangan kemampuan pribadi bagi perkembangan partisipasi politik. Para penulis Barat mempunyai pandangan yang sama dalam hal ini. Tingkat status sosial ekonomi yang tinggi (pendidikan, pekerjaan dan penghasilan) menjadi syarat bagi terciptanya partisipasi politik yang tinggi.

Pandangan di atas didasarkan atas alur pemikiran bahwa mereka yang berpendidikan tinggi memiliki pengetahuan dan informasi lebih baik dibandingkan dengan mereka yang berpendidikan lebih rendah atau tidak sekolah. Dengan modal tersebut, mereka yang berpendidikan tinggi lebih memahami makna kehidupan politik sehingga lebih cenderung terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik.

Pekerjaan yang lebih baik yang dimiliki seseorang mencerminkan kemampuan orang tersebut. Terutama dalam tingkat intelektual dan kemampuan pribadi lainnya. Dalam hal penghasilan, penghasilan yang tinggi memberikan keleluasaan bagi orang tersebut untuk aktif diberbagai aspek kehidupan sosial termasuk politik.

Teori partisipasi politik Barat menganut paham bahwa partisipasi politik hanya dapat dilakukan oleh mereka yang sadar dan paham terhadap apa yang mereka lakukan. Keinginan dan dorongan partisipasi politik haruslah datang dari dalam diri seorang partisipan, bukan datang dari luar yang bersangkutan. Oleh karena itu, mereka yang tidak mempunyai kemampuan pribadi seperti yang digambarkan oleh tingginya status sosial ekonomi tidak akan mampu menjalankan partisipasi politik.

Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan politik yang didasarkan atas mobilisasi politik tidak dapat dianggap sebagai partisipasi politik. Mobilisasi politik dianggap merupakan paksaan untuk berpartisipasi tanpa memperhatikan apakah orang yang didorong itu mengerti apa yang dia lakukan. Kegiatan ini yang disebut sebagai partisipasi politik. Mobilisasi politik dianggap paksaan untuk berpartisipasi tanpa memperhatikan apakah orang yang didorong itu mengerti apa tidak apa yang mereka

Ciri-Ciri Pembangunan Politik
(dalam Studi Kasus Partisipasi Politik di Indonesia)
ADITIYAWARMAN

lakukan, kegiatan seperti ini adalah partisipasi politik semu.

Dari gambaran diatas dapat di tarik kesimpulan semenantara bahwa teori partisipasi politik Barat mensyaratkan adanya ciri-ciri pribadi tertentu pada warga masyarakat agar partisipasi politik dapat berkembang. Hal ini berarti bahwa teori partisipasi politik menganut alur pikir yang bersifat unilinear yang bertingkat. Tahap non partisipasi atau partisipasi rendah bisa di atasi dengan mengembangkan kemampuan pribadi sehingga tahap partisipasi lebih tinggi.

Ciri keempat dari teori partisipasi politik adalah perhatian yang besar kepada pengaruh yang ditimbulkan oleh partisipasi politik terhadap proses pengambilan keputusan. Ada dua sasaran yang dituju oleh partisipasi politik yaitu pengambilan keputusan dan penempatan pejabat-pejabat politik. Partisipasi politik hanya membahas dampak partisipasi politik terhadap penguasa politik dan sebaliknya.

Teori partisipasi politik yang dikembangkan oleh para penulis Barat lebih banyak memberikan perhatian pada partisipasi politik yang konvensional dan memberikan perhatian yang kecil terhadap inkonvensional. Hal ini disebabkan adanya preferensi mereka terhadap cara-cara persuasif yang demokratis dalam melakukan partisipasi politik. Partisipasi politik yang inkonvensional (misalnya perebutan kekuasaan atau revolusi) dianggap sebagai kegiatan politik yang abnormal dan tidak layak dilakukan di dalam sebuah sistem politik yang stabil dan mapan.

Masalah bagi Indonesia Sebagai Negara Berkembang

Masalah Pertama yang ditimbulkan oleh teori partisipasi politik Barat bila diterapkan di Indonesia adalah kesulitan menemukan partisipasi politik sebagaimana diartikan dalam teori tersebut. Partisipasi politik dalam kehidupan bermasyarakat yang tidak memenuhi kriteria dan persyaratan bagi sebuah partisipasi politik. Teori partisipasi Barat dianggap tepat maka untuk Indonesia harus menunggu waktu yang cukup lama sampai tercapainya persyaratan yang harus dipenuhi dalam teori partisipasi politik tersebut yaitu ; tingkat pendidikan, tingkat pekerjaan dan tingkat penghasilan yang baik. Persyaratan yang diperlukan harus menunggu waktu agar

tercapainya partisipasi politik seperti di negara Barat. Selanjutnya, harus menunggu berkembangnya kesadaran masyarakat untuk terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan politik. Kesadaran akan tujuan-tujuan politik yang ingin dicapai juga harus ditunggu untuk dapat berkembang terlebih dahulu. Persyaratan tersebut harus terbentuk terlebih dahulu maka partisipasi politik di Indonesia baru akan dimulai beberapa waktu yang akan datang.

Masalah ke Dua, adanya berbagai persyaratan bagi tumbuhnya partisipasi politik di Barat tidak terlepas dari sejarah masyarakat Barat itu sendiri. Apabila dihitung semenjak masa pencerahan Masa Enlightenment atau Renaissance maka masyarakat Barat modern sekarang ini telah mengalami perkembangan evolusioner yang perlahan tapi pasti selama hampir Lima abad. Maka untuk mencapai masyarakat yang modern seperti sekarang ini dengan tingkat kemajuan yang tinggi diperlukan waktu yang cukup lama. Masalahnya adalah masyarakat dan negara yang sedang berkembang tidak mau menunggu waktu selama berabad-abad untuk mencapai masyarakat yang modern dan demokratis.

Masyarakat Barat pada masa yang lampu juga mengalami masa keterbelakangan dengan tingkat pendidikan, kemampuan ekonomi yang rendah. Pada masa itu tingkat partisipasi politik juga rendah. Perkembangan berbagai sektor kehidupan masyarakat membawa dampak yang besar bagi perkembangan paham demokratis di dalam masyarakat, seiring dengan berkembangnya demokrasi, partisipasi politik juga semakin meningkat.

Gambaran di atas membawa sikap kritis terhadap teori partisipasi politik Barat. Persyaratan partisipasi politik harus ditinjau kembali, prakondisi berupa perkembangan kesadaran politik dan perbaikan-perbaikan di bidang pendidikan, pekerjaan, penghasilan tidak lagi diperlukan lagi secara mutlak. Artinya harus dikembangkan pemikiran baru bahwa partisipasi politik dapat terselenggara dan itu dianggap partisipasi politik meskipun persyaratan tersebut belum berekembang dengan baik. Dengan demikian persyaratan itu harus di munculkan dalam perssyaratan tersebut.

Sesuatu yang baru adalah peranan pemerintah dalam menumbuhkan partisipasi politik. Para penulis Barat berpendapat bahwa

keikutsertaan rakyat dalam berbagai kegiatan politik yang memenuhi ajakan pemerintah tidak dapat dikatakan sebagai partisipasi politik. Dalam teori partisipasi politik yang baru, ajakan pemerintah tersebut haruslah dianggap sebagai persyaratan bagi perkembangan partisipasi politik. Fungsi pemerintah di negara-negara berkembang adalah sangat menonjol karena kekuasaan politiknya yang besar dan terpusat. Oleh karena itu tidak mengherankan bila pemerintah dapat berperan positif dalam menumbuhkembangkan partisipasi politik rakyat. Hali ini tentu saja dengan satu persyaratan adanya orientasi demokratis kalangan elit politik.

Himbuan dan ajakan dari pemerintah merupakan faktor penting dalam menumbuhkan partisipasi politik dinegara-negara berkembang. Para pejabat pemerintah sangat dihormati oleh masyarakatnya, mereka juga dipercaya rakyat terutama di daerah pedesaan. Kenyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah melalui pejabat-pejabat dan lembaga pemerintah dapat membantu masyarakat dalam memperkenalkan unsur-unsur masyarakat modern yang dapat menumbuhkan perhatian dan membuka mata mereka terhadap kehidupan politik mereka yang pada gilirannya akan menumbuhkan partisipasi politik.

Hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam partisipasi politik adalah keikutsertaan masyarakat dalam program-program pembangunan pemerintah. Keikutsertaan dalam program pembangunan pemerintah dapat membantu meningkatkan partisipasi politik karena program-program pemerintah dapat memperkenalkan bermacam-macam informasi seperti hak dan kewajiban warga negara, tujuan pembangunan nasional dan nilai-nilai modern dapat dipahami melalui keikutsertaan dalam program-program tersebut.

Keikutsertaan warga masyarakat di dalam berbagai program pembangunan pemerintah yang pada mulanya memang secara mobilisasi dapat menumbuhkan pemikiran tentang perlunya keterlibatan secara suka rela dan dengan penuh rasa kesadaran. Keberhasilan program pembangunan pemerintah dapat menimbulkan keinginan dan kesadaran di kalangan para masyarakat di desa untuk secara suka rela terlibat dalam kegiatan-kegiatan tersebut.

Teori partisipasi politik yang baru seharusnya melihat bahwa mobilisasi politik adalah sarana perkembangan partisipasi politik. Sikap para penulis Barat pada umumnya adalah mencela mobilisasi politik sebagai sebuah kegiatan yang negative dan tidak berguna.

Berdasarkan pembahasan di atas, terlihat bahwa perlu dibedakan antara teori partisipasi politik untuk masyarakat Barat dan teori partisipasi politik untuk masyarakat Indonesia. Perbedaan dalam sejarah perkembangan. Kedua masyarakat tersebut menghasilkan perbedaan dalam teori partisipasi politik. Masyarakat Indonesia berubah dengan cepat. Pertumbuhan kesadaran dan motivasi untuk melakukan partisipasi politik tidak dapat diserahkan kepada perkembangan jaman tetapi harus di gerakkan dan didorong oleh pemerintah sebagai lembaga yang berfungsi memajukan masyarakatnya. Disini terlihat arti pentingnya mobilisasi politik.

nilai-nilai sosial menjadi mobilisasi politik sebagai sebuah faktor penting dalam perkembangan partisipasi politik. Alur pemikiran penulis Barat tentang partisipasi politik dimulai dari tingkat status sosial ekonomi yang tinggi dan menimbulkan kesadaran politik yang pada gilirannya menimbulkan partisipasi politik. Sedangkan alur pemikiran dalam teori partisipasi politik baru dimulai dari mobilisasi politik yang meningkatkan kesadaran politik untuk kemudian akan mengembangkan partisipasi politik.

Teori partisipasi politik berpandangan bahwa ada mobilisasi politik yang positif yang bertujuan menciptakan suasana yang kondusif bagi perkembangan partisipasi politik, disamping adanya. Mobilisasi politik yang negative yaitu yang merupakan perwujudan dari dominasi politik penguasa. Mobilisasi politik yang positif dilakukan oleh penguasa politik bila tujuannya adalah untuk memberikan pendidikan politik bagi rakyat sebagai bagian yang terpenting dalam sistem demokrasi. Persyaratannya adalah penguasa politik menyadari perlunya dorongan dan ajakan dari pemerintah sebagai sarana untuk mengembangkan partisipasi politik masyarakat. Maka ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan bagi adanya mobilisasi politik yang positif adalah 1. Perlu adanya kecenderungan demokratis di kalangan para penguasa. 2. Adanya pandangan bahwa mobilisasi politik tersebut adalah sarana untuk

Ciri-Ciri Pembangunan Politik
(dalam Studi Kasus Partisipasi Politik di Indonesia)
ADITYAWARMAN

menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi politik. Mobilisasi tersebut dilakukan bukan tujuan akhir karena tujuan akhirnya adalah pengembangan partisipasi politik. Mobilisasi politik yang negative adalah mobilisasi politik yang bertujuan mengekang dan mengawasi partisipasi politik masyarakat karena adanya kecenderungan pihak penguasa politik untuk tetap mempertahankan kekuasaan dengan segala cara. Mobilisasi seperti ini tidak bertujuan untuk menimbulkan partisipasi politik karena penguasa justru takut terhadap partisipasi politik rakyat.

Mobilisasi politik yang negative bertujuan memperkuat kedudukan penguasa politik dengan menekan rakyat. Dalam keadaan seperti ini mobilisasi politik adalah alat penguasa politik untuk mempertahankan kekuasaan bukan sarana untuk mengembangkan partisipasi politik rakyat. Mobilisasi politik yang negative tidak dapat dianggap sebagai partisipasi politik.

PENUTUP

Studi tentang partisipasi politik tidak dapat dipisahkan dari berkembangnya studi tentang pembangunan politik didalam ilmu politik. Keduanya muncul dan berkembang dengan pesat sebagai bidang kajian yang penting dalam ilmu politik seiring dengan kemajuan yang diperoleh dari teori pendekatan tingkah laku pada tahun 1950 dan 1960-an. Teori partisipasi politik yang dihasilkan oleh para ilmuwan politik Barat mempunyai warna Barat yang jelas. Kenyataan ini tidak mengherankan karena sulit memisahkan sama sekali nilai-nilai yang dianut oleh seorang ilmuwan dari teori-teori yang dihasilkannya. Oleh karena itu, teori partisipasi politik Barat tersebut perlu direvisi agar digunakan untuk memahami kehidupan politik di negara-negara berkembang.

Peranan pemerintah adalah sangat penting dalam mengembangkan partisipasi politik di Indonesia. Pandangan ini membedakan mobilisasi politik yang positive dan mobilisasi yang negative. Mobilisasi politik yang positif adalah mobilisasi yang dilakukan oleh penguasa politik dengan tujuan untuk mengembangkan partisipasi politik. Peranan pemerintah yang besar dalam masyarakat dapat menimbulkan partisipasi politik bila pemerintah mengajak masyarakat untuk ikut dalam program-program pemerintah dan membantu serta memperkenalkan berbagai unsur kemajuan

kepada masyarakat. Mobilisasi yang negatif adalah mobilisasi yang diarahkan oleh penguasa politik untuk berbagai kepentingan politiknya dengan mengekang partisipasi politik rakyat.

Teori partisipasi politik Barat dapat diterapkan untuk masyarakat Indonesia, tetapi dengan waktu yang cukup lama. Hal ini adalah gejala yang wajar dalam ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, Gabriel, "Sosialisasi, kebudayaan dan partisipasi politik" dalam Mochtar Mas'ood dan Colin Mac Andrews (edisi), "Perbandingan Sistem Politik" (Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2010)
- Budiardjo, Miriam, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Lasswell, Harold, 1958, *Politics : who, gets, what, when how ?* Cleveland, world Publishing Co.
- Deut, Karl W, 1970 *Politics and Government, how people Decide Their Fate*, Boston Houston Miffin Co.
- After, David E, 1988 *Pengantar Analisa Politik*, LP3ES, P.T. Kincir Buana, Jakarta

